

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun-menjadi-9-54-Persen*, [https://www.bps.go.id/\(2022,Juli,15\)/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen](https://www.bps.go.id/(2022,Juli,15)/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen). Jumlah penduduk miskin 20 persen pada 20 Maret 2022, diakses pada 13 November 2022 Pukul 20.00.
- Biro Humas Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Penanggulangan Kemiskinan di Kendal Masih Perlu Digenjot*, <https://jatengprov.go.id/penanggulangan-kemiskinan-di-kendal-masih-perlu-digenjot/>, diakses pada 13 November 2022 Pukul 20.10
- Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Kartu Jateng Sejahtera Sukses, Besar-bantuan Ditambah*. Retrieved from Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah: <https://jatengprov.go.id/publik/kartu-jateng-sejahtera-sukses-besaran-bantuan-ditambah/>, diakses pada 13 April 2023 pukul 20.00
- Kusnandar, V. B. (2022, Agustus,08). *Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Indonesia (Kuartal I 2017 – Kuartal I 2022)* Dipetik September 24, 2022, dari databoks.katadata.co.id : <https://databoks.katadata.co.id/2022/01/17/angka-kemiskinan-indonesia-turun-jadi-971-pada-september-2021>

Buku

- Alexander, P. (2009). *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Gerston, L, N. (1992). *Public Policy Making in A Democratic society: A Guide to CIVIC Engaagement*. New York: M.E Sharp, p.5.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Iskandar, M. (2021). *Negara dan Politik Kesejahteraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moloeng, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 46-57.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Setiyono, B. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Semarang: Undip Press.

Taufiqurokhman, M. (2014). *Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Kebijakan Publik, 2.

Winarno, B. (2004). *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo. 195-198

Jurnal

Azkiya, M. E.(2017). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5.

Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 1(1).

Barlinta, Y. S. (2007). Kebijakan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. 158-160.

Buyung, D. A. (2016). Implementasi Kebijakan Kemiskinan Melalui Kur Mikro. *Jurnal Administrasi Publik*, 44-45

Ernawati, K., Fadilah, M. R., Rachman, M. A., Nadira, C., Sartika, P. A. J., Jannah, F., & Komalasari, R. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Puskesmas Kresek, Kabupaten Tangerang. *Public Health and Safety International Journal*, 2(02), 140-145.

Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 23-33.

Karim, M. F. (2017). Liberal World Order in the Age of Disruptive Politics: A Southeast Asian Perspective. *Journal of Asean Studies*, 5(1).

Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23-37.

- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. *JURMA: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 160-165.
- Nurani, D. (2009). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Jakarta Selatan. 1-13.
- Mustari, N.(2015). Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi , Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. 46-57.
- Nastia, (2014). Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Studi Penggunaan Lahan dalam Pengembangan Wilayah. *Journal Of Governance And Public Policy*, 1(1).
- Putra, B. K. (2022). Kontribusi Negara dan Masyarakat dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*,10(1).
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 218-231.
- Rakista, P. M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224-232.Saragih, Juli. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1).
- Suharno.(2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis. *Kebijakan Publik*.
- Sulaeman, M., & Ahmad, N. (2020). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera. *Jurnal Pilar*,11(2).
- Ulfa. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Luwu. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).
- Wahyudi, D., & Rejekiningsih, T. W. (2013). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics* 2(1).
- Wanto, A. H. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Public Sector Innovations*, 4-5.

Peraturan/Undang Undang

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin yang Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Wawancara

Wawancara dengan Camat Kabupaten Kendal 2 November 2022

Wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2 November
2022